PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN WALENRANG

IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo

Diajukan Oleh,

DIAN PRATIWI
Nim 15.0401.0099

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019

PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN WALENRANG

IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo

Diajukan Oleh,

DIAN PRATIWI
Nim 15.0401.0099

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Muzayyanah Jabani, ST.,MM.

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dian Pratiwi
NIM	:	15.0401.0099
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 07 - 07 - 2019

Yang membuat pernyataan

Dian Pratiwi
15.0401.0099

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang**" yang ditulis oleh **Dian Pratiwi, NIM. 15 0401 0099** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Jum'at**, 02 **Agustus 2019 M.** bertepatan dengan **01 Dzulqaidah 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi **(S.E).**

Palopo, 22 Agustus 2019 M
21 Dzulhijah 1440 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.	Penguji I	(.....)
4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.Ek	Penguji II	(.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	**Dr. Fasiha, M.EI**
NIP. 19610208 199403 2 001	NIP. 19810213 200604 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **"Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang"**

Yang ditulis oleh :

Nama :Dian Pratiwi

Nim : 15.04.01.0099

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 08 - 07 2019

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 005

Pembimbing II,

Muzayyanah Jabani, ST., MM
NIP. 19750105 200501 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Palopo ,08- 07 2019

Lampiran : 2 eks

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu "AlaikumWr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi sisi Bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawahini:

Nama	:	Dian Pratiwi
NIM	:	15 04 01 0099
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	**"Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing I,

Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP: 19740630 200501 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Palopo, ٥٨ - ٠٦ 2019

Lampiran : 2 eks

KepadaYth.

DekanFakultasEkonomidanBisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu "AlaikumWr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupunt eknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Dian Pratiwi
NIM	:	15 04 01 0099
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	**"Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah laya kuntuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing II,

Muzayyanah Tabani, ST.,MM
NIP: 19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PEGUJI

Judul : **"Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang"**

Yang ditulis oleh :

Nama :Dian Pratiwi

Nim : 15.04.01.0099

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 08 - 07 2019

Penguji I,

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
NIP. 19801004 200901 1 007

Penguji II,

Dr. Adzan Noor Bakri, SE.,Sy MA.Ek
NIP. 19870618 201503 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi Palopo, 08 - 07 2019

Lampiran : 2 eks

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu "Alaikum Wr. Wb.

Setelah melaukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Dian Pratiwi
NIM	:	15.04.01.0099
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	**"Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA

NIP. 19801004 200901 1 007

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Lampiran : 2 eks

Palopo, 08 - 07 -2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu "Alaikum Wr.Wb.

Setelah melaukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Dian Pratiwi
NIM	:	15.04.01.0099
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	**"Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji II,

Dr. Adzan Noor Bakri, SE.,Sy MA.Ek.

NIP. 19870618 201503 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....

HALAMAN JUDUL .....

PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

PERSETUJUAN PENGUJI ..... **vi**

NOTA DINAS PENGUJI ..... **vii**

PRAKATA ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Defenisi Operasional 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relavan 11
B. Kajian Teori 13
1. Pemberadayaan Ekonomi 15
2. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15
a. Pengertian program pemberdayaan masyarakat 15
b. Arti penting perencanan program pemberdayaan masyarakat . 15
c. Ukuran perencanaan program yang baik 17
d. Filosofi program pemberadayaan masyarakat 17
3. Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat 18
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 18
b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 19
c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi 20
d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan 20
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 20

a. Bina manusia 22
b. Bina usaha 23
c. Bina kelembagaan 24
d. Seleksi lokasi 24
e. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat 24
f. Proses pemberdayaan masyarakat 25
C. Kerangka Pikir 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 28
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
2. Subyek dan Obyek Penelitian 29
B. Tehnik Pengumpulan Data 30
C. Sumber Data 31
D. Analisis Data 31
E. Instrumen Peneliltian 31

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 33
1. Gambaran UPK Kecamatan Walenrang 34
2. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Walenrang 34
3. Sistem SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) 35
4. Kendala dan Solusi Berjalannya SPP 41
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kecamatan walenrang 44
a. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah 45
b. Cara pemerintah mensosialisasikan tentang SPP 47
c. Mengevaluasi pemberdayaan masyarakat 48
d. Tujuan utama dalam menentukan perencanan program SPP sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat 49
e. Filosofi pemberdayaan masyarakat 51
f. Peran masyarakat dalam pengembilan keputusan 52
g. Prencanaan pemerintah tentang pemberadayaan masyarakat 52
B. Pembahasan 57
1. Pentingnya perencanaan program pemberdayaan masyarakat 58
2. Ukuran perencanaan program pemberdayaan masyarakat 59
3. Filosofi program pemberdayaan 60
4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 61
5. Partisipasi dalam pelaksanaan 62
6. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi 62
7. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil program 65

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 68
B. SARAN 69
RIWAYAT HIDUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah dan menjadi isu utama di negara-negara berkembang. Masyarakat pada umumnya menjadi miskin bukan hanya karena kekurangan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya materi dari ukur modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman sekarang. Masyarakat dikategorikan miskin salah satunya berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemeberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari 8 agenda *Millenennium Development Goals* (MDG'S) 1990-2015.[1] Maka pemerintah telah melakukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang telah terkait dalam Unit Pengelolaan Kegiatan dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Fenomena kemiskinan pendesaan bukan merupakan suatu gejala yang baru, secara *obsulete* jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang relatif besar.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptkan inovasi dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan maksimal, pemberdayaan ekonomi memerlukan partisipasi dari masyarakat itu

[1] Totok Maardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presfektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta : Bandung,2017), Halaman 25

sendiri. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan proses strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan rangkah pembangunan desa serta bertujuan lainnya yaitu dalam mengurangi kemiskinan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan nilai lebih efektif karena masyarakat dianggap lebih mengetahui segala permasalahan di desa masing-masing.

pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangaunan ekonomi sebagaian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayahkan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarkaat kearah lebih baik.[2] Pemberdayaan di bidang ekonomi pada bidang pemberdayaan masyarakat pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikana kewenangan dan kekuatan kepada masayarakat untuk mengakses sumberdaya ekonomi yang tersedia secaa optimal, sehingga mereka diharapkan memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.[3]

---

[2] Ully Hikmah Andriani,Mochamad Saleh Soeaidy, Ainun Hayat,*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal,* Jurnal Adminstrasi Public, 2015 Vol. 2 N0. 12, Halaman 2-3.

[3] Yuli Kurniyati dan Bening Hadilianti,*Pembangunan Keswadayaan Kelompok PEW sebagai Strategi Pemberdyaan Ekonomi Berbasis Kewilayaan di Kota Yogyakarta,* Jurnal Mkasipreneur, 2015, Vol.1 No. 1, Halaman 161.

Pemberdayaan merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat atau lembaga. Pemberdayaan adalah upayah pembangunan daya saing, yang mendorong, memotivasi, dan membangkitkan aksi yang dimiliki masyarakat serta berupayah untuk mengembangkannya dan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual. Kelompok, dan masyarakat).[4]Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Al-Ra'd ayat 11.

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم
مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٖ ١١

Terjemahnya :"Baginya(Manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkhendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindung bagi mereka selain Dia.[5]

[4] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presfektif Kebijak Publik* (Alfabeta : Bandung, 2017), Halaman 63.

[5] Kementerian Agama Islam RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Cordoba Internasional: Bandung, 2015), Halaman 249.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal pemberdayaan perlunya perubahan pada pola pikir masyarakat itu sendiri untuk berdaya, mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Maka dari itu perlu dibentuknya pemberdayaan ada masayarakat untuk memberikan pelatihan pada masyarakat agar lebih mandiri dan dapat berupaya menesejahterakan individu atau masyarakat yang tidak terlepas dari keikut sertaan pihak pemerintah sebagai pemeberian modal.

Realita yang ada di pendesaan terlihat masalah seperti masalah kelangkaan modal (*lack of capital)* masih menjadi penghambat utama pembangunan kawasan pendesaan. Dengan model pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan memanfaatkan dana bantuan program simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.[6] Pemerintah melakukan program yang dijalankan oleh lembaga UPK dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) untuk mengurangi angka kemiskinan rumah tangga di desa-desa. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Walenrang sudah berjalan kurang lebih 13 Tahun (dari tahun 2006) dengan jumlah kelompok peminjam 177 kelompok kecamatan walenrang, dengan 8 desa 1 kelurahan yaitu Kalibamamase, Baramamase, Lalong, Saragi, Bulo, harapan, tombang, dan walenrang, dan Batusitanduk.

Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksana rencana pembangunan dan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dalam rangka pelaksanaan PNPM,

---

[6]Isnan Murdiansyah,"*Evaluasi Program Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat",* Jurnal WIGA, 2014, Vol. 4 No. 1 halaman. 13

PTO beserta Penjelasannya menjadi dasar hukum bagi pelaksana dana bergulir bagi masyarakat yang dikelola oleh UPK.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang beranggotakan ibu-ibu merupakan dana bergulir dengan membentuk kelompok agar peminjam dapat mengembalikan dana lalu di kelola dan dapat membentuk kelompok baru, uang yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan dengan meminjamkan dana ke kelompok lalu mengembalikan dana sesuai dengan pinjaman tersebut. Dana Unit Pengelola Keuangan di pinjamankan kepada masyarakat untuk membangun usaha kecil untuk menambah pendapatan rumah tangga. Tujuan pelaksana program Unit Pengelola Kegiatan bisa tercapai, maka dirancang strategi yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada pada lembaga UPK kelompok SPP dan lingkungan berpengaruh bagi kegiatan SPP tersebut, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar bisa terwujud.

Pemberdayaan yang tepat harus mampu menciptakan iklim yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dan melindungi atau menjaga orang-orang yang kuat menurut mardikanto dalam jurnal Azis Muslim. Karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan menjadi masyarakat mandiri dan mampu mengatasi permasalahannya sendiri bukan tergantung pada pihak yang lain. Menurut Suyanto dalam jurnal Azis Muhammad menyatakan salah satu penyebab gagalnya membangun kemandirian masyarakat adalah suatu kesalahan dalam menemu-kenali faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan faktor ekonomi atau rendahnya pendapat seseorang, tetapi juga menyangkut dengan

faktor budaya, geografi dan faktor lainnya yang menyebabkan upaya kemandirian masyarakat miskin menjadi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mendampingi masyarakat.[7]

Sesuai ketentuan umum pasal 1 pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesehjateraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat hidup layak dan dapat melaksanakan tugas dan fugsi sosial.[8]

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan sehingga pemerintah mengupayahkan mengurangi angkah kemiskinan pada setiap daerah dengan merancang program yang dijalanakan oleh UPK dengan memberikan modal kepada kaum perempuan, dengan adanya SPP di Kecamatan walenrang dapakah memberdayakan masyarakat sekitar dan dapat mengurangi angkah rumah tangga miskin sehingga penulis ingin meneliti tentang " **Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan kecamatan Walenrang"**

[7] Azis Muslim,*Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin,*Jurnal Penyuluhan, Vol.13 No.1 maret 2017, halaman 81.

[8] Marlina Sinaga,*Peran Unit Pengelola Kegiatan(UPK) pnpm Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,* (Medan : Universitas Medan Area, 2018) halaman 16

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem simpan pinjam kelompok perempuan pada UPK Kecamatan Walenrang?
2. Bagaimana Kendala dan solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam kelompok perempuan pada UPK Kecamatan Walenrang?

C. *Tujuan Penelitian*

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem simpan pinjam kelompok perempuan pada UPK Kecamatan Walenrang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada program simpan pinjam kelompok perempuan pada UPK Kecamatan Walenrang.

D. *Manfaat Penelitian*

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan lebih luas dan pengalaman baru pada saat meneliti.
2. Bagi Akademis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referansi kedepannya.

3. Bagi UPK, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan dalam penyaluran dana simpan pinjam.
4. Bagi Kelompok Perempuan Peminjam, sebagai motivasi bahwa perempuan mempunyai potensi besar dalam menjalankan usaha dengan baik.
5. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

E. *Defenisi Operasional Variabel*

Defenisi operasional variabel yang dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dalam suatu penelitian kedalam indikator-indikator yang lebih terperinci. Defenisi operasional yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan interprestasi pembaca terhadap variabel yang ada dalam penelitian sehingga peneliti lebih menegaskan bahwa judul penelitian diatas adalah "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Walenrang".

Tabel 1.1 definisi operasioanl variabel

Variabel	**Aspek**	**Indikator**
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu secara sadar yang ditetapkan sebagai proses berdaya	Perencanaan program pemberdayaan masyarakat	a. Arti penting perencanaan program pemberdayaan masyarakat. b. Ukuran perencanaan program pemberdayaan masyarakat c. Filosofi program

		pemberdayaan masyarakat.
	Partisipasi pemberdayaan masyarakat	a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-ha

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relavan*

Siaga Basu, dkk (2015) "Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan". Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pendesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pendesaan di desa Bendungan, kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif; hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis kemudian akhirnya bertahap/proses pelastarian.[1]

Sutikno, dkk, (2015) " Pemilihan Program Pengetasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem". Penelitian ini bertujuan menyusun program-program pengetasan kemiskinan melalui model pemberdayaan masyarakat dan mengkaji kembali proses penentuan program sebagai evaluasi efektivitas program pemberdayaan kemiskinan yang dinilai masih belum dapat berjalan dengan baik. Metode yang

[1] Siaga Basu, dkk, *Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung*, Jurnal Penyuluhan, Vol.13 No.1 2015

digunakan analisi SWOT untuk melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan.[2]

Yulanita Cahya Chrystanti & Indah Ulli Wardati," Sistem Pengelolaan Data Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelolaan Kegiatan UPK Mitra Usaha Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan". Penelitian ini dilakukan untuk membuat dan menghasilkan perangkat lunak untuk pengelolaan data simpan pinjam yang dapat menghemat dan mempercepat waktu input dan ouput data yang sebelum masih menggunakan sistem konversional. Adapaun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah pustaka , observasi, wawancara, analisis data dan sistem perencanaan. Yang dihasilkan dari penelitian adalah dapat memudahkan pencarian data baik input maupun output didapat secara tepat data dapat dikontrol dengan baik dan dapat mengurangi kesalahan.[3]

Ana Zahrotun Nihayah," Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan *Poverty reductoin".* Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh SPP terhadap pendapatan usaha mikro. Metode penelitian ini menggunakan mix kualitatif dan kuantitatif, kualitatif seperti survei, dan wawancara sedangkan kuantitaif yang

---

[2] Sutiko, dkk, *Pemilihan Program Pengetasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem,* Jurnal Administrasi Vol 1 Edisi 1 2015.

[3] Yulanita Cahya Chrystanti & Indah Ulli Wardati, *Sistem Pengelolaan Data Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelolaan Kegiatan UPK Mitra Usaha Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan,* Jurnal Pemberdayaan, Vol. 1 No. 1, 2015.

digunakan regresi linear. Dengan hasil penelitian pemberian pinjaman program simpan pinjam kelompok perempuan berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini tersebut dibuktikan dengan perhitungan indikator *Proverty reduction* melalui pengukuran pendapatan perkapital responden dengan membandingkan dengan garis kemiskinan sehingga memperoleh angkah *proverty reduction* sebesar 20 persen hal ini berarti terjadi pengurangan kemiskinan sebesar 20 persen pada penerima pinjam simpan pinjam kelompok perempuan.[4]

Persamaan dan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah di tinjau dari segi judul pada penelitian terdahulu pertama menyatakan hasil penelitian yang dilakukan masih kurang maksimal adanya model pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan penelitian terdahulu kedua masih melakukan pertahapan, penelitian yan ketiga dengan hasil penelitian sudah efektifitas dengan adanya model pemberdayaan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan rumah tangaa dengan adanya program simpan pinjam kelompok perempuan, kemudian penelitian yang keempat membahas tentang perangkat input dan ouput pada model pemberdayaan melalui program simpan pinjam kelompok perempuan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tentang mengkaji pemberdayaan masyarakat program simpan pinjam kelompok perempuan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ditinjau dari segi metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

[4] Ana Zahrotun Nihayah, *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Dan Poverty Reductio*, Jurnal Ekonomi Vol 5 No 2, 2015.

B. *Kajian Teori*

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberdayaan berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar dan sebagainya, pemberdayaan dijelaskan sebagai usaha syarat suatu cara, proses pemberdayaan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memajukan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Mas'oed defenisi pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment)* atau penguatan (*strenghening)* kepada masyarakat sedangkan menurut Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[5]

Sedangkan menurut Ginarjar Karsasmita adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimiliki oleh masyarakat.[6]

Menurut sulistyani menyatakan secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan, atau proses pemberian

---

[5] Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam Presfektif Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta), 2017 Halaman 27

[6] Irma Yani, *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura*, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, Medan 2018, Halaman 19.

daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian model pemberdayaan adalah pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya yang diberikan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang kurang berdaya.

Pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat adalah melalui program pemberdayaan yang merumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *batton up*, dimana pada pelaksanaan kegiatan dilapangan dilakukan atas dasar inisiatif aspirasi dari masyarakat. Menurut Wrihatnolo menyatakan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan.[7]

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, berkembang berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi, dan pegetasan kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh adalah lebih memberdayakan usaha masyarakat agar lebih efesien, produktif, dan berdaya saing, yaitu dengan menciptakan iklim uasaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Dalam rangkah pembinaan usaha masyarakat perlu dikembangkan hubungan mitra dan bentuk keterikatan

[7] Kholidah Attina Yopa, skripsi,"*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wisata Budaya di Kebondalemkidul"*(Klaten, Jawa Tengah, Universitas Negri Yogyakarta, 2018), Halaman18.

usaha saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecilserta koperasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi.[8]

2. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat[9]

a. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat

Teori-teori manejemn antara lain diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakan untuk menyusun asumsi yang diduga bakal terjadi dimasa mendatang untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

b. Arti Penting Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Upaya perubahan yang berencana memerlukan partisipasi setiap warga masyarakat. Kelsey dan Hearne menekankan pentingnya berpartisipasi dalam setiap program yang dibentuk pemerintah agar dapat melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dapat dijamin kelangsungan dan memperoleh partisipasi masyarakat.

c. Ukuran Perencanaan Program yang Baik

Perencanaan program yang dirumuskan telah baik jika disampaikan seberapa acuan tentang pengukurannya yang mencakup:

---

[8] Devi ayu pratiwi,"*Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(pnpm) Terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara"*, Institut Agama Islam Negri(IAIN) Palopo, 2017, Halaman 24.

[9] Totok Mardikanto dan Soebianto Poerwoko, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam presfektif publik*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 238

1) Analisis Fakta dan Keadaan

Perencaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap menyangkut keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan, tersedianya saran danprasarana serta dukungan kebijakan, keadaan sosial, keamanan dan stabilitas politik.

2) Pemilihan Maslah Berlandasan pada Kebutuhan

hasil analisis fakta dan keadaan, biasnya menghasilkan berbagai maslah baik masalah yang ada maupun belum dirasakan masyarakat setempat, sehubung dengan hal ini, perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata yang telah dirasakan masyarakat.

3) Jelas dan Menjamin Kebutuhan

Perencanaan program harus jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan atau kesalah pengertian dalam pelaksanaannya. Akan tetapi di dalam kenyataan, seringkali selama proses pelaksanaan dijumpai hal-hal khusus yang menuntut modifikasi perencanaan yang telah ditetapkan.

4) Merumuskan Tujuan dan Pemecahan Masalah yang menjanjikan kepuasan

Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat penerimaan manfaatnya, jika program semacam ini tidak mungkin dapat menggerakkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya, dengan demikian masyarakat harus mengerti tentang manfaat apa yang mereka rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai.

5) Menjaga Keseimbangan

Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan sebagaian besar masyarakat, dan bukannya demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja, karena itu setiap pengambilan keputusan harus dikenakan kepada kebutuhan orang banyak.

6) Proses Berkelanjutan

Perumusan masalah, pemecahan masalah dan tidak berkelanjutan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapa berikutnya harus dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Termasuk dalam hal ini adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang kaan dihadapi.

7) Memberikan Kesempatan Evaluasi Proses dan Hasil

Evaluasi, merupakan proses berkelanjutan dan melekat dalamperencanaan program. Oleh karena itu perencanaan program itu sendiri harus memuat dan memberikan kesempatan untuk dapat dilaksanakan evaluasi, baik evaluasi terhadap proses maupun hasilnya.

d. Filosofi Program Pemberdayaan Masyarakat[10]

untuk memenuhi persyaratan prinsip-prinsip perencanaan program yang baik, setiap penyusunan program perlu memperhatikan filosofi program pemberdayaan masyarakat ssebagai berikut:

1). Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari kebutuhan-kebutuhan yang telah

[10] Totok Mardikanto dan Soebianto Poerwoko, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam presfektif publik*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 285-288

dirasakan oleh masyarakat sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai upaya pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang telah dikendaki.

2). Bekerja yang dilandasi oleh anggapana masyarakat ingin bebas dari penderitaan dan kemiskinan, artinya setiap program dilakukan harus benar-benar diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehisupan masyarakat dan bukannya merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat demo tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki perumusan program.

3). Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan dan pola pikir. Artinya perumusan program harus mencakup banyak demensi perilaku manusia. Dalam kaitan ini harus selalu diingat bahwa setiap pembangunan pada dasarnya harus mampu membangun manusianya, pembangunan fisik yang tanpa membangun membangun perilaku manusia seringkali mengakibatkan bermanfaatnya hasil-hasil pembangunan secara maksimal.

4). Masyarakat adalah sumber daya yang terbesar. Artinya dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat penerima manfaat baik itu seperti modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang sudah ada.

3. Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat[11]

Pengertian partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut sertaan secara aktif dan sukarrela, baik karena alasan-alasan dari dalam

[11] Totok Mardikanto dan Soebianto Poerwoko, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam presfektif publik*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 270-273

(*instrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalm perencanaan.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat(termasuk pemnfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpatisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diwilayah setempat atau ditingkat lokal.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbanganya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemeretaan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainya yang sepada dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaanpembangunan dalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisasi warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitas) dalam jangka panjang.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evalusai

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juaga diperlukan untuk memperoleh umpan baik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunnan

Partisipasi dalam pemanfaatan pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpatisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Sayangnya partisipasi dalam pemanfaatan hasi pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya,

yang seringkali menanggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasaranya. Padahal seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat [12]

Pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian"kemampuan dan keberanian" maupun daya dalam arti " kekuasaan atau posis-tawar". Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangkah kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan produktif untuk meningkatkan pendapatan. Sumadyo merumuskan tiga pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebgai tri bina, yaitu: bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Sedangkan Mardikanto menambahkan pentingnya bina kelembagaan, kerena ketiga bina yang dikemukakan (bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan jika didukung oleg efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan. Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

[12]Totok Mardikanto dan Soebianto Poerwoko, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam presfektif publik*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 275-277

a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simati, atau partisipasi masyarakat.
b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang diberikan manfaat atau perbaiakan keadaan.
d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya
e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemebrdayaan, yang ditunjukkan berkembangannya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
f. peningkatan efektivitas dan efesiensi kegiatan pemberdayaan.
g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

1. Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Sedangkan dalam ilmu manejemen, manusia menempati

unsur yang paling unik. Sebab, selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manejemn itu sendiri. Termasuk dalam upaya bina manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu:[13]

a) pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yaitu meliputi: memperjelas visi, misi, dan kebudayaan organisasi, kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi.
c) Pengembangan kapasitas sistem yaitu meliputi pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem yang sama, dan pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi diluar sistem.

2. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, biana manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambahkan kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak dan manfaat bagi yang memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Tentang hal ini, bina usaha mencakup:

a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha
b. Study kelayakan dan perencanaan bisnis
c. Pembentukan badan usaha

[13] Totok Mardikanto dan Soebianto Poerwoko, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam presfektif publik*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 278-280

d. Perencanaan investasi dana penentapan sumber-sumber pembiayaan.
e. Pengelola SDM dan pengembangan karir.
f. Manejemen produksi dan operasi
g. Manejemen logistik dan finansial
h. Penelitian dan pengembangan
i. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis
j. Pengembangan jejaringan dan kemitraan
k. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3. Bina Kelembagaan

Hayami dan Kikuchi mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat) dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata"*Institution"* adalah satu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosialogi. Mosher menyatakan bahwa untuk membnagun struktur pendesaan yang progresif dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan: sarana produksi, dan peralatan pertanian, kredit produksi, pemasaran produksi, pemasaran produksi, percobaan/pengujian lokal, dan penyuluhan, dan transportasi. Keenam jenis kelembagaan tersebut, harus tersedia di setiap lokalitas usaha dan memiliki keterkaitannya dengan lembaga sejenis di tingkat nasional.

4. Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriterian yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan

lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

5. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemebrdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

6. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan tarif hidupnya dengan proses sebagai berikut:

a. Mengeidentifikasi potensi wilayah, adapun tahapan pad ini adalah persiapan masyarakat dan pemerintah stempat untuk melakukanpertemuan- awal dan teknisi pelaksanaanya.
b. Menyusun rencanakelompok
c. Menerapkan rencana egiatan kelompok.
d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipasi .[14]

[14] Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia,*Petunjuk Teknisi Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,* Direktor Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Halaman 25-29

C. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang teori bagaimana bisa berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

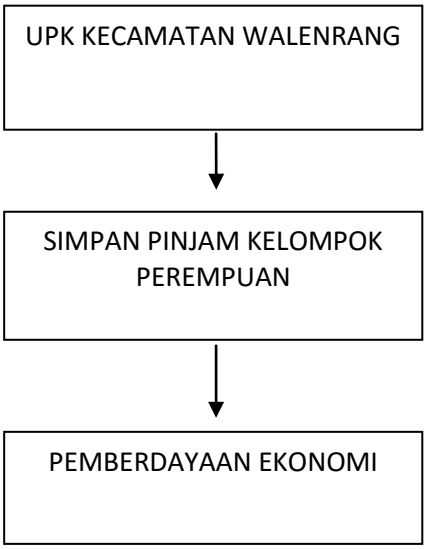

Pemberdayaan Ekonomi melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada UPK Kecamatan Walenrang dengan melihat kerangka pikir di atas sebagaimana UPK Kecamatan sebagai input, UPK merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendanaan dimana program yang dijalankan yaitu simpan pinjam kelompok perempuan untuk membuat usaha dan mengembangkan usahanya, sedangkan SPP adalah proses dari hasil yang akan diteliti dari output untuk memperdayakan ekonomi masyarakat yang aktif dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif. Deskritif yakni menggambarkan hasil penelitian dari gejala yang ditemukan di lapangan terhadap suatu kasus tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif agar penelitian ini lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna. Jenis penelitian kualitatif sering disebut jenis penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah.

1. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi yang ditempati peneliti untuk menjalankan penelitiannya bertempat di UPK Kecamatan Walenrang serta desa-desa peminjam. Waktu melakukan peneliti selama 1 minggu.

2. Subyek dan obyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau apa saja yang bisa menjadi sumber dalam memberikan informasi atau data penelitian. Suhar Simi Arikunto menyatakan tiga kategori dalam subyek penelitian yaitu *person, place* dan *paper.* Metode penentuan subyek ini bertujuan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi subyek penelitian ini yaitu pihak UPK seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPK Kecamatan Walenrang, beserta 3 kelompok peminjam SPP.

Obyek penelitian adalah pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

UPK Kecamatan Walenrang. Dalam penelitian populasi adalah kelompok peminjam pada UPK kecamatan Walenrang sebanyak 9 kelompok.

B. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Untuk mendapatkan daya yang diperlukan dalam penelitian digunakan prosedur, alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar suatu peristiwa atau kejadian untuk membantu menjawab pertayaan penelitian, untuk membentu mengerti perilaku manusia, dan untuk mengevaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan meninjau langsung kelapangan untuk mencari data-data di kantor UPK serta mengikuti tahap-tahap pada saat kelompok melakukan pendanaan, data yang di dapat peneliti yaitu kegiatan ekonomi anggota peminjam SPP

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pennanya dengan narasumber yang memberikan informasi seputar data yang diperlukan, sehingga peneliti menggunakan penggumpulan data dengan wawancara dengan pihak dan kelompok peminjam SPP pada UPK Kecamatan Walenrang. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem pada saat melakukan

pinjaman, peran, kendala dan solusi serta upaya pihak UPK dalam memberdayaan kelompok peminjam SPP.

Dokumentasi digunakan pada penelitian ini memperoleh data-data sekunder yang berupa kegiatan maupun catatan atau laporan yang berhubung dengan pelaksanaan ditempat tersebut. Dokumentasi dilakukan peneliti menunjukkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data dari tempat lokasi, seperti pada saat melakukan pencairan di kantor UPK maupun di desa masing-masing.

Teknik yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan subyek sesuai dengan keadaan yang terjadi sesuai dengan tinjauan lapangan dengan menghasilkan realita.

C. Sumber data

Data yang didapatka peneliti adalah data primer dan sukender :

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/respoonden maupun berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran atas perubahan-perubahan yang dimiliki oleh suatu obyek.

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dari dokumentasi/publikasi/laporan. [1]

[1] Sadik Ikhsan dan Artahnan Aid,"*Analisis SWOT Untuk merumuskan Strategi Pengembangan Komoditas Karet Di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah",* Jurnal Agribisnis Pendesaan,2011, Vol.1 No.3. Hal.4.

D. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang dipakai dari data lapangan dengan tujuan untuk menggolongkan, memilih dan membuang data yang tidak perlu sehingga ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sutau rangkaian informasi yang akan menghasilkan penarik kesimpulan data atau informasi. Pada tahapan ini data yang dikelompokkan sesuai dengan tema atau pokok-pokok permasalahan sehingga memudahkan data disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya perna ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausual atau interaktif, hipotesis.

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama karena dalam hal penelitilah yang langsung berhubungan dengan respoden atau objek lainya dan menjadi dari segalanya dari proses penelitian. Menurut Meleong dalam penelitian kualitatif penelitian sebagai instrumen utama yaitu merupakan rencana,

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, danmenjadi pelapor hasil peneitian.

Table 2.1 Instrumen Penelitian

Pertanyaan	**Pihak UPK**	**Ketua kelompok SPP**	**Anggota Kelompok SPP**	**Kepala Desa**
Arti penting perencanaan program pemberdayaan masyarakat				
1. Apa yang dilakukan pihak pemerintah (UPK) dalam perencanaaan program pemberdayaan masyarakat				
2. Bagaimana cara pihak UPK mensosialisasi tentang SPP ke masyarakat				
Ukuran perencanaan program pemberdayaan masyarakat				
1. Bagaimana mengevaluasi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari proses pemberdayaan kelompok SPP				
2. Tujuan utana dalam menentukan perencanaan program pemberdayaan masyarakat				
Filosofi program pemberdayaan masyarakat				
1. Awal mula terjadinya program SPP di kecamatan walenrang				
Partisipasi dalam pengambilan keputusan				
1. Bagaimama peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pemberdayaan masyarakat				
2. Apakah perencenaan pemerintah dapat memberdayakan masyarakat				
Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan				
1. Bagaiman partisipasi masyarakat				

dalam mendukung keberhasilan terkait adanya program kelompok spp				
Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi				
1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkaitadanya program kelompok spp				
Partisipasi dalam pemantauan hasil-hasil pembangunan				
1. Darimanakah sumberdana program pemberdayaaan masyarakat dan pengelola keuangan tingkat masyarakat				
2. Bagaimana pemberdayaan masyrakat dalam pemanfaatan SPP				

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Walenrang*

UPK ialah pengelolaan dana bergulir yang berasal dari program (PPK,PNPM-PPK dan MAD yang Mandiri Pendesaan) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan BKKAD atau MAD yang mengacu pad atujuan dan prinsip program. Pengurus upk ialah masyarakat yang sudah terpilih dan melibatkan secara langsung yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan kecakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas. Dalam pendanaan dana bergulir upk, mendukung dari lembaga pendukung paling dapat tim verfikasi dari badan pegawas upk dengan ketentuan kelembagaan dan operasional di atur dalam AD/RT BKDA. Pendanaan operasional bersifat pendanaan pendukung tugas bukan bersifat intensif yang tetap setiap bulan. Upk setiap tahun anggaran mewajibkan disampaikan perencanaan bekerja wajib disampaikan. Perencanaan keuangan termasuk perencanaan pendapatan dan biaya. Merencanakan penghasilan tidak merencanakan alokasi (Pembagian porsi pendapatan) tetapi memperhitungkan memperkirakan penghasilan untuk satu tahun dan dapat diperbolehkan dilakukan pembagian alokasi sebelum di perhitungkan seluruh biaya dan resiko. Ketentuan pendanaan operasional upk. Pengunaan surplus operasional upk tahunan setelah mempertimbangkan resiko

peminjam sesuai dengan laporan kolektibilitas dan alokasi operasional ketentuan pendanaan kelembagaan pendukun upk.[1]

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Walenrang beralamat di desa kalibamamase,jln.poros Palopo-Masamba. Kecamatan Walenrang terletak di arah utara dari ibukota Kabupaten Luwu dan utara dari arah ibu kota Provensi Sulawesi Selatan dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota Provensi selama kurang 8-9 jam.

Kecamatan Walenrang, Kab.Luwu Provensi Sulawesi Selatan terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 17.411 jiwa, 4.328 KK. Sebanyak 1.084 KK (25%) dikategorikan keluarga miskin. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang, dll. Dan potensi sumberdaya alam yang potensial adalah petani adapun produk unggulannya adalah padi dan cokelat.

Kecamatan ini telh berpartisipasi dalam PKK sejak tahun 1998, dan sampai saat ini telah terdaftar alokasi BLM PKK 1 (Siklus 1/2/3), PKK III (Siklus 7/8), dan PNPM-MPD (TA 2010,2011,2012 dan 2013).

1. Visi dan Misi UPK Kecamatan Walenrang

Visi : mengupayakan Masyarakat yang Sejahtera, Adil dan Makmur.

Misi : 1. Membina Mayarakat untuk Menjadi Mandiri

2.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Walenrang.

3. Mewujudkan Lpangan Kerja yang Produktif

4. Meningkatkan Asset UPK Walenrang.[2]

---

[1] Kementrian dalam Negri Republik Indonesia, *Penjelasan Petunjuk Teknisi Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyaraakat (PNPM-Mandiri Pendesaan)* Direktorat Jendaral Pemberdayaan Masyarakat dan Pendesaan, Halaman 1-5

[2] Nurganini (Sekretaris UPK Walenrang), wawancara14 januari 2019.

2. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Walenrang

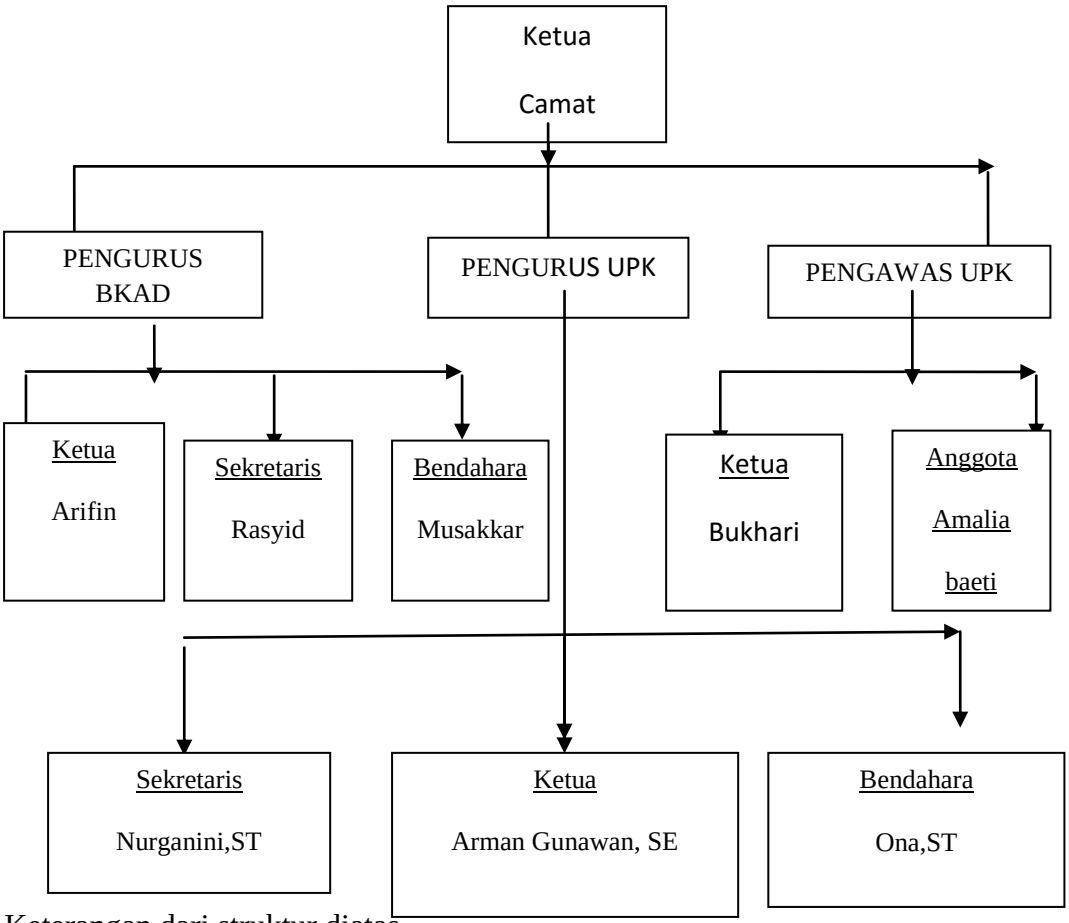

Keterangan dari struktur diatas

Ketua Camat berperan sebagai pembina pelaksana kegiatan pemberdayaan desa.

BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) merupakan lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau bebebrapa desa di satu wilayah, BKAD dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program dari kelembagaan UPK, sarana prasaran dari kegiatan pemberdayaan.

Pegawas UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, admistrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.

Tim Verifikas adalam tim yang dibentuk dari anggota masyarakat berperan sebagai pemeriksaan dalam penilaian kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.

UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah sebagai unit pengelolaan dan operasional pelaksanaan kegiatan antara desa, UPK mendapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana perguliran.[3]

B. *Hasil Penelitian*

1. Sistem Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

a. Prosedur Pengajuan Simpan Pinjam

1) Kelompok Peminjam harus mempunyai ikatan pemersatu yang kuat, misalnya Rukun Tetangga/Rukun Warga.
2) Mempunyai Pengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3) Anggota Kelompok yang menjadi pemanfaat benar-benar warga desa setempat atau warga sekecamatan dibuktkan dengan photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) yang masih berlaku.
4) Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota keluarga dan diketahui oleh RT atau RW desa setempat.
5) Pengurus tingkat desa maupun tingkat kecamatan pelaku tidak diperkenakan menerima pinjaman dari dana SPP kecuali mendapatkan persetujuan BP-UPK dan BKAD.
6) Kelompok lunas yang akan mengajukan kembali pinjamannya harus dinilai kondisi pinjamannya:

[3] Petunjuk Teknisi Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, Direktorat Jendral Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman 13.

a) Jika tidak pernah menunggak pinjaman dapat ditingkatkan dari pinjaman sebelumnya.

b) Jika pernah menunggak atau sampai dengan kolektibilitas II, maka pengajuan sama dengan pinjaman sebelumnya.

c) Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas III, maka pengajuan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya.

d) Jika mempunyai catatan dengan kolektibilitas VI dan maksimal V maka kelompok tidak diperkenankan untuk diberi pinjaman sebelum tunggakan kelompok terselesaikan dibayar dengan lunas.

b. Persyaratan kelompok peminjam:

1. Kelompok mempunyai pengurusan yang jelas, minimal ketua,sekretaris dan bendahara.
2. Minimal mempunyai buku/catatan dan buku khas harian.
3. Jumlah anggota kelompok yang meminjam adalah minimal 6 orang dan maksimal 15 orang.
4. Ketua wajib membawahi hanya satu kelompok peminjam.
5. Dalam satu kelompok yang meminjam tidak boleh terdiri dalam satu keluarga.
6. Jumlah maksimal pinjaman kelompok lama sebesar RP.5.000.000 untuk ketua dan anggota maksimal RP.4.000.000, dan untuk kelompok baru sebesar maksimal Rp.2.000.000.

c. Sistem Pengembalian Pinjaman

1. Jumlah pinjaman sebesar Rp. 2 juta/anggota dengan rinci pengembalian sebesar Rp. 187.000.
2. Jumlah pinjaman sebesar Rp. 3 juta/anggota dengan rincian pengembalian sebesar Rp. 280.000.
3. Jumlah pinjaman sebesar Rp. 4 juta/anggota dengan rincian pengembalian sebesar Rp. 375.500.
4. Jumlah pinjaman sebesar Rp. 5 juta/anggota dengan rincian pengembalian sebesar Rp. 467.000. Tempo pengembalian pinjaman selama 12 bulan.

Sistem yang diadakan oleh pihak UPK yang ditetapkan oleh Pemerintah telah disepakati dan bersedia dilakukan kelompok peminjam agar dapat melakukan peminjaman modal dan mengembangkan usahanya.[4]

d. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan melalui tahapan sebagai berikut:

1. MAD Sosial

Dalam MAD sosial dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan memanfaatkan.

[4] Ona, Bendahara UPK, Wawancara 14 januari 2019.

2. Musdes Sosialisasi

Dalam musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

3. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut:

a. kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategori kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategori kelompok mengacu pada ketentan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaatan.
b. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampirkan: identitas setiap anggota kelompok.

4. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa melalui keputusan Musyawarah Kelompok Perempuan(MKP) mrupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.

5. Verifikasi

a. Penetapan formulir verifikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses [enyesuaian dengann contoh formulir yang telah disediakan.

b. Proses pelaksaan verifikasi sebagai berikut:

Pengalaman simpan pinjam, persyaratan kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam(permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, dan pendapatan), penilian khusus rencana kegiatan, dan penilian kategori kelompok[5].

e. Sistem pelaporan dan pencatatan UPK

1. Sebagai media informasi keuangan danaSPP untuk dianalisis.
2. Sebagai media laporan pertanggung jawaban pengurus UPK kepada masyarakat.
3. Sebagai media pengawasan dan pengendalian internal UPK serta eksternal (aparat pemerintah, konsultan, BP UPK, Foru, MAD dan unsur masyarakat lainnya).[6]

f. Laporan keuangan UPK

1. Sebagai pembelajaraan administrasi yang sesuai dengan kaidah akuntansi.
2. Sebagai informasi prestasi UPK dalam pengelolaan keuangan.
3. Memberikan persamaan persepsi tentang keuangan SPP, sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi.
4. Memberikan informasi yang standar tentang kondisi keuangan SPP.
5. Untuk membuat indikator keuangan tentang tingkat pengembalian, surplus dan rasio, modal hutang dan lain-lain.

---

[5] Formulir Petunjuk Teknisi Operasional Program Snasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal 58.

[6] Nurganini, Sekretaris UPK, Wawancara 14 Januari 2019.

Perkembangan UPK Kecamatan dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari jumlah kelompok SPP tahun 2018.

Terlihat dari tabel 1.1. dan tabel 1.2.berikut jumlah peminjam selama tahun 2018.

Tabel 1.1.

Nama Desa Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Kecamatan Walenrang	Jumlah Kelompok Kecamatan Walenrang
Lalong	36
Saragi	12
Bulo	7
Batusitanduk	28
Harapan	25
Tombang	13
Walenrang	21
Kalibamamase	12
Baramamase	23
Jumlah	177

Tabel 1.2.

Tahun	Jumlah Asset
2016	25 M
2017	26 M
2018	27 M

Sumber Data: Sekretaris UPK.

Jenis Usaha Kelompok Peminjam

Tabel 1.3.

Jenis Usaha Kelompok Peminjam
Pedagang Pakaian
Penjual Beras
Pedagang Campuran
Penjual Sayur
Penjual Bahan Pertanian

Sumber Data : sekretaris UPK

2.Kendala dan Solusi Berlajalannya SPP di Kecamatan Walenrang

a. Kendala permasalahan dalam SPP

1. Banyaknya peminjam melakukan kredit macet sehingga peminjam yang lain tidak dapat meminjam uang dengan jumlah yang banyak
2. Kurangnya masyarakat untuk diberdayakan pihak UPK dalam menjalankan program SPP telah membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan melakkan perkumpulan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam hal berkelompok, serta saling memunculkan ide yang baru untuk meningkatkan kualitas diri dalam meningkatkan perekonomian.
3. Kelompok peminjam menyalah gunakan uang pinjaman untuk keperluan rumah tangga yang menyebabkan pinjaman yang diberikan tidak semata-mata di pakai untuk menambahakan modal dalam mengembangkan usaha, akan tetapi banyaknya kebutuhan dan keperluan lainnya.
4. Permasalahan terakhir yaitu antara anggota dalam satu kelompok ada salah satu dari anggota yang malas dalam menyembalikan uang pijaman sehingga

kelompok tersebut menunggak dan bermasalah dalam SPP dan kelompok peminjam menjadi terpecah bela.[7]

b. Solusi permasalahan dari pihak UPK

1. Tim pengawasan UPK lebih tegas lagi dalam memberi sanksi kepada peminjam yang menunggak.
2. Melakukan pertemuan antara kelompok-kelompok agar tidak dapat berselisih lagi.
3. Melakukan observasi sebelum peminjam melakukan prosedur SPP.[8]

3.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Walenrang Melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Kecamtan walenrang mempunyai 8 desa 1 kelurahan, setiap desa di kecamatan walenrang memiliki kelompok dengan berjumlah 3-6 jumlah kelompok dengan melakukan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah yang libat. Pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokrasi agara mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu UPK di dijalankan oleh lembaga sebagai wadah dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kulaitas kehidupan dan menumbuhkan kesadaraan masyarakat menjadi mandiri serta menjadi pelengkap bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga Lembaga UPK tidak membatasi banyaknya peminjam yang ada di Kecamatan Walenrang agar masyarakat sekitar tetap bisa meminjam sesaui dengan kebijakan atau aturan

[7] Jumriani, Kelompok Mekar jaya Desa Kalibamamase, wawancara 14 Januari 2019.
[8] Nurganini, Sekretaris UPK Kecamatan Walenrang, Wawancara 14 Januari 2019

yang dibuat oleh lembaga UPK dengan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perempuan untuk dapat berdaya dan diberdayakan sehingga memberikan peningkatan terhadap taraf hidup yang lebih baik. Dalam hal ini diberdayakan adalah para perempuan-perempuan ibu rumah tangga dalam upaya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

A. Arti Penting Perencanaan Program SPP pada Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak UPK pada program SPP adalah dengan melakukan musyawarah desa khusus perempuan (MKP) dalam rangkah membahas gagasan-gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan. Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya, hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan kemusyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai usulan dari desa.[9]

Wawancara dari ketua UPK Arman Gunawan menyatakan:

> "SPP merupakan program yang dijalankan oleh PNPM-Mandiri pada tahun 2014 yang terdiri program-program yang dijalankan PNPM-Mandiri seperti infrastruktur, program simpan pinjam kelompok perempuan(SPP/kegiatan ekonomi) dan pelatihan keterampilan dengan membagi anggaran sebesar 3M perprogram tersebut, kemudian pada tahun 2010 pemerintah mengganti PNPM-Mandiri dengan dana desa lalu upk yang menjalankan program spp tersebut diibahkan dananya untuk menjalankan program SPP sampai sekarang. Adapun kelompok-kelompok peminjam yang sudah lama bekerjasama dengan upk dalam meminjam dana sebagai tempat untuk mengambil modal dalam menjalankan usahannya."[10]

[9] Kementerian dalam Negri Republik Indonesia, Petujuk Teknisi Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Mandiri, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman.22.

[10] Arman Gunawan, Ketua UPK Kec.Walenrang, hasil Wawancara 14 Januari 2019

> Hasil wawancara dari ibu Bertha ketua kelompok SPP sakura desa lalong menyatakan ” saya meminjam uang spp untuk memodali usaha jualan nasi kuning dan barang campuran disekolah, saya sudah 2 tahun meminjam uang spp alhamdulillah saya tidak perna menunggak tetapi biasanya kalau jualan tidak laku dalam beberapa hari selama jualan atau kadang saya jarang berjualan karena ada urusan penting sehingga saya lambat dalam membayar atau kadang saya minta bantuan kepada pihak UPK agar memberi kelonggar dalam membayar biasanya pihak upk memberi kesempatan dalam melunasi pembayaran kelompok.”[11]

> Hasil wawancara dari Intan ketua kelompok mawar desa Kalibamamase menyatakan “ saya meminjam uang spp baru 5 bulan karena kelompok mawar biasanya ada anggota kelompok yang keluar dan sering menunggak dalam pembayaran sampai biasanya saya yang menutupi tunggakan kelompok agar pihak upk tetap memberikan kami pinjam karena modal dari upk sangat membantu saya dalam jualan sayur dipasar.[12]

Perencanaan program spp untuk memberdayakan masyarakat dilihat dari faktor pertama dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang sangat minim, sehingga program SPP dibuat dan digilirkan kepada masyarakat, Faktor kedua dari kondisi kepala rumah tangga yang khusus di Kecamatan Walenrang yang berprofesi sebagai petani, dilihat dari pekerjaan tersebut masih minim perekonomian dalam mencakupi kebutuhan sandang, pangan danpapan serta kebutuhan rumah tangga lainnya, Faktor ketiga tidak dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat akan tetapi dilihat dari kebutuhan akan modal usaha yang diperlukan masyarakat dalam mengelola ushanya menjadi lebih besar dan lebih maju.

Khusus di Kecamatan Walenrang ketiga faktor di atas menjadi faktor pendukung atau tolak ukur program dalam mengulirkan dana bantuan SPP kepada

---

[11] Bertha, Ketua kelompok SPP sakura, Desa Lalong Kec.Walenrang , Wawancara 10 juni 2019

[12] Intan, Ketua Kelompok Mawar Desa Kalibamamase, Wawancara 14 Juni 2019

masyarakat. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang minim serta penghasilan keluarga yang tidak mencukupi. Akan tetapi program SPP ini tidak hanya diberkan kepada masyarakat yang kurang mampu juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam membuat usaha juga diberikan pinjaman untuk melakukan pinjaman dana bergulir SPP.

2. Cara pemerintah atau pihak UPK mensosialisasikan tentang SPP kemasyarakat

Adapun pernyatan dari Arman Gunaawan ketua UPK Kecamatan walenrang tentang mensosialisasikan adanya program spp:

> Program SPP ini di tujukan hanya khusus wanita, kami bekerjasama dengan aparat desa untuk hadir dikantor camat setiap desa mewakili untuk membahas tentang kegiatan program SPP ini yang merupakan kegiatan peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif, kemudian pihak UPK mensosialisasikan kembali di desa-desa tentang program SPP itu sendiri.[13]

Pernyatan yang diperkuat oleh Intan kelompok Seruni Desa Kalibamamase pada saat pemerintah dan pihak UPK mensosialisasikan tentang program SPP.

> Saya mengetahui adanya program SPP itu dari pihak desa setempat dengan mensosialisasikan atau membagi undangan ke masyarakat untuk hadir di kantor desa, awalnya saya tidak tau untuk apa undangan tersebut setelah saya hadir dan pihak UPK menjelaskan tentang program SPP mereka menyatakan bahwa simpan pinjam kelompok perempuan itu dapat meminjamkan uang untuk membuat usaha lalu dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk membantu ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan kebutuhan sehari-hari, kemudian saya tertarik untuk ikut karena saya juga mempunyai usaha telur ayam, saya dapat meminjam di UPK untuk menambah modal saya dalam menjalankan usaha.[14]

B. Ukuran Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

[13] Arman Gunawan, Ketua UPK Kec.Walenrang, Wawancara 14 Januari 2019
[14] Intan, Kelompok Seruni Desa Kalibamamase, Wawancara 10 juni 2019

1. Mengevaluasi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari Program Kelompok SPP

Program yang dimaksud yaitu spp pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melihat setiap tahun kelompok peminjam tambah meningkat perdesa peminjam, sekretaris UPK menyatakan bahwa.

> "dari tahun 2016- 2018 kelompok peminjam sebanyak 177 kelompok dengan 8 desa 1 kelurahan, berbagai macam usaha yang mereka jalankan, sehingga kebanyakan masyarakat di Kec. Walenrang berpartsipasi dalam kegiatan SPP ini."[15]

2. Tujuan Utama dalam Menentukan Perencanaan Program SPP Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kegiatan kelompok SPP adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh rumha tangga miskin yang merupakan kegiatan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan rumha tangga miskin. Selain penambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan usaha kapasitas pelaku usaha. Bentuk kegiatan ini untuk bermanfaat bagi rumah tangga miskin yang telah mempunyai usaha, berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan masyarakat, didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat, mendukung perkembangan dan berkelanjutan usaha, memacahkan masalah yang dihadapi termasuk masalah rendahnya produktivitas usaha yang dijalankan.

> Pernyataan kepala desa kalibamamase, pada saat melakukan sosialisasi dikantor desa bnayak masyarakat yang antusias terhadap kegiatan ini, terutama di desa saya sendiri masih banyak rumah tangga miskin dimana suaminya hanya seorang petani dan tidka mungkin semua kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, saya melihat ketika pemerintah merencanakan salah satu program PNPM-Mandiri ini yaitu kelompok simpan pinjam perempuan saya pribadi gembira karena sangat bermanfaat bagi

[15] Ona, Bendahara UPK Kec.Walenrang, Wawancara 14 Januari 2019

> masyarakat saya dalam membnagun usaha dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.[16]

Untuk mengetahui perencanaan program yang harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau kesalahan dalam melaksanakannya. Akan tetapi selama proses perencanaan harus memberikan peluang pada program tersebut sehingga mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Pada saat program SPP di Kec.Walenrang pemerintah setempat dan pihak UPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat bahwasan pemerintah melakukan program kegiatan ekonomi yang diaktifkan untuk wanita untuk mengurangi angka kemiskinan rumah tangga sehingga, para ibu yang berkedudukan hanya sebagai ibu rumah tangga juga bisa menambah penghasilan dari sang suami atau kebutuhan keluarga sehari-hari. Program spp yang dijalankan oleh UPK dengan bertujuan untuk membantu masyarakat setempat dalam membangun usaha kecil dengan menjadi peminjam spp harus melakukan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah yang diatur oleh UUD No.25 tahun 2000.

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan baik, denganikut melakukan perkumpulan yang dilakukan setiap kelompok guna meningkatkan kemmapuan masyarakat untuk mampu berdaya serta dengan dilakukannya pertemuan kelompok setiap bulannya dapat meningkatkan solidaritas anatr sesama, menjadikan masyarakat lebih terdorong untuk aktif serta lebih mandiri. Program SPP di sosialisasikan oleh pemerintah desa lalu pihak desa

[16] Rusli Bara, Kepala Desa Kalibamamase, Wawancara 14 Januari 2019

menyampaikan ke masyarakat desa yang membutuhkan bantuan. Pengevaluasian setiap kelompok dilakukan dengan mengadakan pertemuan pada saat pencairan setiap anggota kelompok diharuskan hadir dan mengevaluasi setiap kelompok peminjam. seperti yang dikatakan kelompok mawar pada saat melakukan pencairan.

> "Biasa pencairan dilakukan setiap kantor desa atau rumah anggota di desa batusitanduk, setiap kelompok peminjam harus hadir pada saat pencairan karena harus bertandatangan atau bukti penerimaan uang, kalau tidak bisa hadir biasa anaknya atau yang mewakili hadir, pencairan biasa kalau lunas mi pembayar ta selama 1 tahun kalu mauki lagi ambil uang mengurus ki lagi atau bikin ki proposal baru, bagusnya diadakan pencairan supaya pihak Upk dan peminjam saling mengenal."[17]

C. Filosofi Pemberdayaan masyarakat

Filosofi pemberdayaan masyarakat adalah sumber daya terbesar, artinya dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat harus memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia didalam masyarakat penerima manfaat sendiri baik itu, sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan memanfaatkan program kelompok SPP. Simpan pinjam kelompok perempuan merupakan salah satu kegiatan program PNPM Mandiri perdesaan yang berupa kegiatan perguliran dana untuk menjadikan masyarakat miskin pendesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan, pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi untuk SPP dikendalai oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana. Semakin besar proporsi danan untuk fasilitas

[17] Rusni, Anggota Kelompok Mawar Desa Batusitanduk, Wawancara 10 Juni 2019

sarana dan prasarana, maka semakin kecil ketersediaan dana untuk kegiatan SPP, sedangkan keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh pembiayaan proposal yang diajuhkan oleh kelompok SPP.[18]

> Saya sudah menjabat sebagai ketua UPK selama 10 tahun pertama kantor UPK berada di samping kantor kecamatan atau masih satu kantor dengan kecamatan di Batusitanduk, kemudian kantor UPK dipindahkan ke daerah desa kalibamamase dengan kantor sendiri sehingga seluruh kelompok dapat melakukan verifikasi dikantor UPK karena sekang sudah memiliki ruangan aulah untuk melakukan perkumpulan atau rapat membahas tentang SPP.[19]

D. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

1. Peran Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokrasi agara mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari program pemerintah ini gunakan mengurangi angka kemiskinan rumha tangga di Kecamatan Walenrang, masyarakat adalah peran utama dalam program ini sehingga masyarakat yang mengetahuiapa yang terbaik untuk mereka, dengan melakukan program-program yang dapat membenahi pendesaan seperti program kerja yang dilakukan PNPM-Mandiri seperti pembangunan infrastruktur, program SPP, dan pelatihan-pelatihan.

---

[18] Kementerian Dalam Negri Republik, Petunjuk Teknisi dan Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, Direktorat Jendral Pemberdayaan Dan Desa, Halaman 24-25.

[19] Arman Gunawan, Ketua UPK Kec.Walenrang, Wawancara 14 januari 2019

> Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik ketika program yang dijalankan pemerintah tepat dengan sasaran yang mendapatkan sehingga program ini dapat memberdayakan masyarakat, dan masyarakat yang ingin diberdayakan harus aktif dan berpartisipasi dalamsetiap pengambil keputusan dan bekerja sama dengan pemerintah.[20]

2. Perencanaan Pemerintah tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberdayaan ekonomi dapat terwujud apabila pokok sasaran dapat fokus pada pengetesankemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta demokrasi dalam politik. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha pemberdayaan dibutuhkan faktor pendorong yang dapat mendorong terjadinya pemberdayaan seperti: sumberdaya manusia, sumberdaya alam, permodalan, prasarana produksi dan pemasaran

> Walaupun pemerintah sudah membuat program pegetesan kemiskinan tetapi kalau masyarakat itu sendiri yang masa bodoh atau tidak berpartisipasi dalam program-program PNPM-Mandiri, maka program itu dinyatakan gagal akan tetapi jika pemerintah dan masyarakat setempat dapat bekerjasama baik bagi pembangunan maupun kegiatan ekonomi maka program program tersebut berhasil.[21]

E. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam memberdayakan masyarakat Walenrang pemerintah melakukan program dana bergulir yang dikelola oleh UPK Kecamatan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut, pemberdayaan dilakukan di Kecamatan Walenrang karena masyarakat sekitar merupakan kategori kurang mampu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan

[20] Rusli Bara, Kepala desa Kalibamamase Kec.Walenrang, Wawancara 10 Juni 2019
[21] Arman Gunawan, Ketua UPK Kec.Walenrang, Wawancara 14 Januari 2019

usahanya, sehingga Kecamatan Walenrang merupakan salah satu Kecamatan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan tujuan mengurangi angkah kemiskinan rumha tangga masyraakat setempat.

Masyarakat dapat diturut perankan dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan terbentuknya lembaga salah satu tugas UPK keuangan yang fokus kepada usaha simpan pinjam yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat, warga yang memanfaatkan usaha simpan pinjam tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya mereka dalam mengembangkan usaha masyarakat sehingga pengelola keuangan dan simpan pinjam dapat berjalan. Terbentuknya lembaga dan aspiratif yang dipilih dan dikelola masyarakat setempat, dengan latar belakang pendidikan tidak terlalu tinggi sehingga dalam keterampilan warga mampu mengelola kegiatan simpan pinjam. Telah tersusunnya program kegiatan dengan salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomi simpan pinjam yang diharapkan dapat terus berjalan yang di review dan dilaporkan pertanggung jawabannya kepada pemerintah.

> Hasil dari kegiatan dari PNPM-Mandiri pendesaan yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembnagkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah bahwa jika hasil kagiatan tidak di kelola dengan baik seperti tidak dipelihara atau tidak di manfaatkan atau pengendalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapatkan dana untuk tahun berikutnya.[22]

F. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

1. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait adanya program SPP

[22] Arman Gunawan, Ketua UPK Kecamatan Walenrang, Wawancara 10 Juni 2019.

Informasi yang disampaikan oleh aparat desa dengan melalui musyawarah desa (Musdes) sosialisasi yang merupaka pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau peyebar luasan informasi tentang program yang dijalankan oleh PNPM-Mandiri, hasil yang diharapkan dalam musdes sosialisasi yaitu tersosialisasinya informasi pokok PNPM-Mandiri perdesaan seperti tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur, dapat memahami kebijakan pemerataan RTM, tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah, adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM-Mandiri perdesaan. [23]

Pemantauan dan pegawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaansuatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prossedur dari PNPM., melihat dari kinerja semua pihak yang turut serta serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan, proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari pemantauan dan penyesuaian terhadap perencanaan menjadikan sebagai masukan untuk evaluasi terhadap program.[24]

---

[23] Kementerian dalam Negri Republik Indonesia, Buku Petunjuk Teknis Operasional Pragram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pendesaan, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman 21.

[24] Kementerian dalam Negri Republik Indonesia, Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal 42.

> Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dimana Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program.[25]

Evaluasi dalam PNPM dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil dari pelaksanaan kegiatan atau telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya kinerja para pelaku PNPM. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak rpgram hasil dari pemantauan dan pengawasan dapat dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Apabila hasil penilaian isi laporan dinyatakan penyimpangan dari rencana, kriteria atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan,melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu seperti bisa dilkaukan di pertengahan atau diakhir tahun program atau siklus. Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui oleh pelaku-pelaku di lapangan.[26]

G. Partisipasi dalam Pemantauan Hasil-hasil Pembangunan

kinerja program, sebelum melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terlebih dahulu indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam program tersebut. Indikator yang digunakan dalam program yaitu:[27]

---

[25] Arman Gunawan, Ketua UPK Kec.Walenrang, Wawancara 10 Juni 2019

[26] Kementerian dalam Negri Republik Indonesia, Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman 43-44.

[27] Kementrian dalam Negri Republik Indonesia, Penjelasan Petujuk Teknisi Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaa, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman 3.

a. Indikator Input

   Digunakan untuk mengukur jumlah sumber daya (dana/anggaran,SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan program.

b. Indikator Proses, untuk mengambarkan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Indikator Keluaran, untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauh mana terlaksana sesuai dengan rencana.

d. Indikator Hasil, untuk menggambarkan hasil nayat dari keluaran suatu kegiatan.

e. Indikator Dampak, digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program.

1. sumber dana program Pemberdayaan masyarakat dan pengelola keuangan tingkat masyarakat

Dana PNPM-Mandiri adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM-Mandiri perdesaan berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM-Mandiri seperti tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala desa, PJOK, dan lain-lain mempunyai tugas memantau keuangan dari program yang dijalankan oleh PNPM-Mandiri. Audit dan pemeriksaan keuangan tergolong menjadi 3 Pertama: pemeriksaan rutin sebagaimana dilakukan oleh fasilitator Kecamatan

atau pedamping lokasi setiap kunjungan desa untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana, dalam pemeriksaaan rutin tim pengelola kegiatan kemudian memberikan saran dan perbaiakan dalam buku keuangan.

Kedua: audit internal yang dilakukan oleh fasilitator Kabupaten, manejemen provinsi dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhdap proses pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir.

Ketiga: pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilakukan oleh BPKP selaku audit yang ditetapkan dalam Laon Agreement anatara pemerintah Indonesia dengan Donor (Bank Dunia). BPKP dapat bekerjasama dengan badan pengawasan daerah (Bawasda). Untuk pemeriksaan ini akan mengeluar pemeriksaan terhadap PNPM-Mandiri sebagai acuan pemeriksaan.[28]

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam program SPP

> Dalam memberikan dukungan terhdap PNPM mandiri yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP .[29]

C. *Pembahasan*

1. Pentingnya Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Adapun beberapaa alasan yang melatar belakangi diperlunya perencanaan program, dapat dikemukan sebagai berikut:

---

[28] Kementerian dalam Negri Republik Indonesia, Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal 43.

[29] Ona, Bendahara UPK Kec.Walenrang, Wawancara 10 Juni 2019

a) Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat (umum). Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian dibandingkan dengan pernyataan tertuli dan dapat dikaji ulang setiap saat, sejak sebelum, selama, sesudah progra tersebut dilaksanakan.
b) Menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah dapat dicapai, diperlukan pedoman yang jelas yang dapat diukur dan dapat dievaluasi.
c) memberikan pengertian yang jelas,
d) menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.[30]

Perencanaan program itu sangat penting dilakukan ketika melakukan kegiatan pemberdayaan, pada saat program SPP dijalankan semua pihak yang turut serta dalam pemgambilan keputusan menyepakati adanya kegiatan ini dan masyarakat juga besedia menjalankan program dan turut serta dalam kegiatan spp itu.

2. Ukuran Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program dijalankan dengan baik dilihat dari sego pemilihan masalah berlandasan kebutuhan. Hasil analisis fakta dan keadaan biasanya menghasilkan berbagai masalah baik itu masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat. Perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-

[30] Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presfektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 235-236.

masalah nyata yang telah dirasakan masyarakat yang artinya perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak dipenuhi kebutuhan nyata masyarakat yang telah dapat dirasakan oleh mereka.[31] Program yang dijalankan oleh pemerintah ini bagi saya pribadi sangat membantu dari segi bantuan modal dalam mengembangkan usaha saya.

Program pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil sebenarnya jika masyarakat berpartisipasi seutuhnya dalam kegiatan ini, kegiatan spp ini ditujuan untuk masyarakat rumah tangga miskin dan masyarakat yang memiliki usaha dapat meminjam dana atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tetapi masih banyak kelompok yang bermasalah baik itu dari pembayaran yang ditunggak sampai ada yang meminjam uang hanya untuk keperluan pribadi, sehingga kegiatan ini masih fifti-fifti dikatakan berhasil mengurangi angkah miskin rumah tangga.

3. Filosofi Program Pemberdayaan

Setiap penyusunan program memperhatikan filosofi program pemberdayaan masyarakat, seperti bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan, artinya setiap program yang akan dilaksanakan harus benar-benar diupayahkan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyraakat dan bukannya merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyrakat demi tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh perumusan program. Karena itu, setiap perumusan program

[31] Totok Mardikanto, dan Poerwako Soebiato, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam Presfektif Kebijakan Publik* , (bandung: Alfabeta, 2017) hal 240.

harus mampu merumuskan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat penerima manfaat.[32]

Perencanan program yang pengambilan keputusan masyarakat sendiri kemudian pemerintah hanya menjalankan, merumuskan, mengevaluasi,dll sesuai dengan pedoman, jika pemerintah membuat program yang disepakati oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angkah kemiskinan rumah tangga miskin di kec.Walenrang, dari segi yang layak menerima manfaat dari program ini yah masyarakat itu sendiri, kami hanya menjalankan program kemudian masyarakat yang menentukan.

4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Proses pemberdayaan dilakukan untuk masyarakat dalam memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar yang dimiliki seorang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memajukan apa yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah dalam hal ini berpartisipasi dalam memberikan bantuan atau kegiatan dengan tujuan mengurangi angka rumah tangga miskin, masyarakat adalah sasaran dalam kegiatan pemberdayaan ini, dalam hal pengambilan keputusan pemerintah sangat memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.[33]

Soal kegiatan ini pemerintah dan masyarakat sudah bekerjasama dalam melakukan pemberdayaan, saya sudah melakukan pelatihan, pihak PNPM

---

[32] Titok Mardikanto, dan Poewoko Soebiato,*Pemberdayaan Masyarakat dalam Presfektif Kebijakan Publik*,(Bndung: Alfabeta, 2017) hal. 243

[33] Titok Mardikanto, dan Poewoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat ddalam Presfektif kebijakan Publik,* (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 243

Mandiri atau pemateri menyatakan bahwa, pemberdayaan yang dilakukan ini salah satu jalan keluar dalam mengurangi angka miskin rumah tangga per kecamatan, tetapi secara nyata kegiatan ini memang 60% masyarakat kec.Walenrang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

5. Partisipasi dalam pelaksanaan

Pemberdayaan, pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktid berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu yang harus ditumbuhkan kembangkan dalam proses pembangunan, namun dlaamprakteknya tidak selalu diupayahkan sungguh-sungguh. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikanoleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuhnya partisipasi dapat didekat dengan beragam pendekatan, menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau *responses* atas rangsangan-rangsangan yang diberikan, yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat yang dpat diharapkan (Berlo) dengan melihat kesempatan yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan untuk dapat berpartisipasi. Sedangkan menurut Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembnagnya partisipasi masyarakat dalam sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untk berpartisipasi
2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisiapasi telah mengetahui tentang:

1) Adanya masalah yang sedang dihadapi dan memer;ukan upaya pemecahannya
2) Adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri.
3) Pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam pemecahan masalah tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan.
4) Adanya kepercayaan dalam diri setiap warga masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. [34]

Kegiatan spp ini hanya untuk rumah tangga miskin dan masyarakat yang memiliki usaha dlaam hal ini, masih ada masyarakat yang tidak melakukan oartisipasi dlam program spp mungkin dikarenakan mereka cukup dalam pemodalan atau malas dalam hal pengurusan, tetapi kami kelompok mawar sudah lama menjalankan kegiatan spp ini karena di kelompok banyak yang memiliki usaha kecil seperti penjual sayur dipasar, penjual campuran, gula merah. makanya kami mengikuri kegiatan ini karena sangat membantu kami dalam penambhan modal, tidak tau kelompok lain.

[34] Totok Mardikanto dan Poerwoko Sobiato, *Pemebrdayaan Masyarakat dalam Presfektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 95-95

6. Partisipasi dalam Pemantau dan Evaluasi

Berdasarkan subyek pelaksanaan kegiatan pemantauan, pegawasan dan evaluasi dalam program dapat digolongkan menjadi dua golangan yaitu: Pemantauan, pengawasan dan evaluasi internal dan pemantauan, pengawasan dan evaluasi eksternal. Berdasarkan waktu kegiatan pemantau, pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan program secara rutin dan secara berkala.

Metode pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program secara garis besar dibagi menjadi partisipasi dan konvensional.

1) Metode Partisipasi

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang terbaik adalah dilakukan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program sekaligus yang paling merasakan dampak langsung dari program. Mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan tersebut.

2) Metode Konvesional

Kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara konvesional utamanya digunakan untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaku program.

Khusus mengenai evaluasi ekonomi, Valera dan Plopino memebedakan anatara”*cost-benefit analysis”* dan “*cost-effectiveness analysis”* di dalam perhitungan *cost-benefit analysis,* kegiatan evaluasi mengacu pada tingkat efesiensi program yakni dengan membandingkan seberapa jauh nilai manfaat yang diperoleh dari setiap unit nilai korbanan yang dinilai dengan uang. Pad

aanalisi seperti ini baik korbanan maupun manfaat, kesemuanya mencakup manfaat yang terhitung maupun tak terhitung, yang dimaksud dengan korbanan/manfaat yang dapat mudah dinilai dalam bentuk uang(pupuk, tenaga kerja, produk,dll), sedangkan yang tak terhitung adalah yang tidak mudah dinilai dengan uang seperti perasaan, kebebasan dan kepuasan. Sedangkan yang dimaksud dengan korbanan/manfaat langsung adalah semua korbanan yang secara langsung diperuntukkan dihasilkan oleh program yang dilaksanakan.

Dilain pihak perhitungan *cost rffectiveness analysis* adalah analisis korbanan/ manfaat yang mengacu kepada seberapa jauh manfaat teknis/fsik yang diperoleh oleh setiap unit nilai korbanna yang dikeluarkan untuk membiayai program yang dilaksnakan. Perhitungan manfaat tetap satuan fisik tetapi perhitungan korbananya dinaytakan dalam satuan ekoknomi atau nilai uang.

Pemantau program diartikan sebagai proses pengumpulan informasi data dan fakta dan pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program, dengan dimaksd untuk menghidari terjadinya keadaan-keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program sehingga program tersebut tetap dilaksanakan seperti direncanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.[35]

Dalam kegiatan ini pemerintah melakukan evaluasi dengan melihat buku kas, laporan keuangan dari bendahara upk, dalam prosedur kegiatan ada pihak-pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi.

[35]Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Presfektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta,2017), Halaman 268.

Mungkin dalam kegiatan ini kami sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah kami juga mengambil manfaat dari kegiatan ini meskipun ada salah satu anggota yang sering menunggak sehingga nama kelompok saya biasa dapat masalah, seperti sulit meminjam kembali uang spp di karenakan kita dapat meminjam jika uang pinjaman bulan kemarin lunas.

7. Partisipasi dalam Pemanfaat Hasil Program

Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini selama bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tentang evaluasi program ini secara khusus Rossi dkk sangat menekankan pentingnya kegiatan evalauasi terhadap:

a) Siapa kelompok penerima manfaat program, dimana lokasinya dan bagaimana spesifikasi kelompok penerima manfaat program tersebut.
b) Apa metode terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
c) Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan.
d) Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

Sanders, mengemukakan adanya 5 faktor dalam keberhasilan program pemberdayaan yaitu:

1) Adanya identifikasi sistem sosial sebelum perencanaan program sangat diperlukan sebab penerima manfaat pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

2) Identifikasi mengenai *key individual* dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat peelusuran terhadap individu-kunci sangat diperlukan dalam perencanaan program, sebab mereka dapat mengembangkan opini publik yang sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

3) Penerimaan tujuan program dalamkehidupan masyarakat keberhasilan program sangat ditentukan oleh seberapa jauh program direncang itu benar-benar telah diterima.

4) Peran serta secara aktif dalam masyarakat keberhasilan program pad adasarnya sangat ditentikan oleh partisipasi masyarakat baik dalam pemberian input, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun hasil-hasil program.

5) Dorongan aktif dari setiap individu dalam masyarakat, adanya peran aktif warga masyarakat sebenarnya belum cukup jika tidak disertai dorongan-dorongan yang mereka berikan demi keberhasilan program peran masyarakat seringkali terbatas kepada pemenuhan harapan yang dimintakan kepadanya, tanpa dibarengi oleh sikap atau kehendak yang dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan tentang manfaat program yang kaan dilaksanakan.[36] Sebenarnya program spp ini sudah banyak masyarakat yang bergabung terkusus di Batusitanduk sudah memiliki 28 kelompok, meskipun masing-masing kelompok.

[36] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soeviati, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Presfektif Kebijakan Publik,* (Bandung: Alfabeta, 2017) Halaman 249-250

Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan rumah tangga msikin deangan memberikan modal batuan untuk membuat usaha kecil, dan masyarakat yang memiliki usaha lalu dikembangkan dengan meminjam dana dari upk atau mengikuti program spp. Mungkin ada anggota kelompok yang hanya meminjam dana dengan keperluan pribadi, tetapi kami dari pihak upk belum mengetahui. Masyarakat di kec.walenrang sudah berpartisipasi baik dari bergabung di program spp.

Laporan keuangan kelompok mawar desa Batusitanduk dengan usaha dagang

Nama	Jabatan dalam kelompok	Modal kerja	Jumlah Pinjaman	Jangkah waktu pinjaman
Rusni	Ketua kelompok	500.000,00	5.0000.000,00	12 bulan
Roslia	Sekretaris	500.000,00	5.000.000,00	12 bulan
Desi	Bendahara	400.000,00	5.000.000,00	12 bulan
Daliati	Anggota	500.000,00	5.000.000,00	12 bulan
Nurul huda	Anggota	500.000,00	5.000.000,00	12 bulan

Berdasarkan laporan keuangan dari kelompok mawar desa Batusitanduk diatas dengan usaha berdagang jumlah pinjaman perorang sebanyak lim ajuta rupiah dengan waktu pengembalian 12 bulan, jumlah yang dikembalikan setiap peminjam sebanyak Rp.467.000. dilihat dari laporan keuangan pihak UPK

kelompok bunga mawar ini melakukan pembayaran lancar dan selalu membayar uang pinjamantepat waktu.

Laporan keuangan kelompok Sakura desa Lalong dengan jenis usaha toko dan dagang

Nama	Jabatan dalam Kelompok	Modal Kerja	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu Pinjaman
Bertha	Ketua	400.000,00	7.000.000,00	12 Bulan
Melian.S	Sekretaris	500.000,00	7.000.000,00	12 Bulan
Megawati	Bendahara	500.000,00	7.000.000,00	12 Bulan
Hermika	Anggota	400.000,00	7.000.000,00	12 Bulan
Irmawati	Anggota	400.000,00	7.000.000,00	12 Bulan
Santa Ponganan	Anggota	400.000,00	7.000.000,00	12 Bulan

Berdasarkan laporan keuangan dari kelompok sakura desa Lolang dengan jumlah pinjaman sebanyak tujuh juta rupiah dengan jangka waktu 12 bulan, kelompok sakura ini merupakan kelompok yang sudah lama dan aktif dalam pinjaman dengan usaha mereka bertoko dan berdagang. Dengan jumlah pengembalian sebanyak Rp. 653.500.

Laporan keuangan dari kelompok seruni dari desa Kalibamamase, jenis usaha pedangang.

Nama	Jabatan dalam kelompok	Modal kerja	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu Pinjaman
Intan	Ketua	500.000,00	5.000.000,00	12 Bulan
Herlina	Sekretaris	400.000,00	5.000.000,00	12 Bulan
Nurbayati	Bendahara	400.000,00	5.000.000,00	12 Bulan
Nuria	Anggota	400.000,00	5.000.000,00	12 Bulan

Kelompok seruni merupakan kelompok yang aktif, selama 2 tahun berjalan jumlah pinjaman setiap kelompok sebanyak lima juta dengan jumlah pengembalian pinjaman sebanyak Rp.467.000.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama menulis skripsi dengan judul"*Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan",* maka penulis dapat mengambil kesimpilan sebagai berikut:

1. Sistem Simpan Pinjam Kelompok Perempuan(SPP) menggunakan sistem pendanaan bergulir dimana setiap peminjam mematuhi syarat-syarat dan tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh pihak UPK, dengan mengisi proposal pinjaman.
2. Kendala dalam permasalahan SPP yaitu adanya kelompok yang melakukan tunggakan dalam pembayaran SPP, kelompok peminjam menyalagunakan uang pinjaman untuk keperluan rumah tangga bukan untuk mengembangkan usahanya, solusi di kendala yang ada diberikan pihak UPK sendiri antaranya melakukan observasi sebelum melakukan prosedur SPP, melakukan pertemuan antara kelompok agar tidak berselisih lagi.

B. Saran

1. Bagi Pihak UPK dalam program SPP ini meminjamkan dana kepada masyarakat yang dalam mengembangkan usahanya bukan kepada masyarakat yang menggunakan dana sebagai keperluan pribadi.

2. Bagi pihak peminjam SPP melakukan pembayaran tepat waktu agar dana yang dikemabalikan dapat membantu kelompok lain.
3. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi bagi masyrakat agar aktif dalam kegiatan SPP itu sendiri selain dapat membantu dalam mengembangkan usaha juga dapat mengurangi angka kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Walenrang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al karim

Arman Gunawan, Ketua UPK Kecamatan Walenrang, Wawancara 14 Januari 2019

Andriani, Kelompok SPP Sakura Desa Saragi, Wawancara 14 Januari 2019

Aid, Artahnan dan Sadik Ikhsan.2011.*Analisis SWOT Untuk merumuskan Strategi Pengembangan Komoditas Karet Di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.*Vol 1 No.3.

Andini, Ully Hikmah,dkk.2015.*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal.*

Ayundari, Ratna.2015.*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Bhakti Manunggal Di Dusun Tulung Desa SrihardonoPundong Bantul Yogyakarta.* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Azis Muhammad, *Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin(Study Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur),* Jurnal Penyuluhan, Vol.13 No.1, maret 2017.

Bertha S. Kelompok SPP Ketua Kelompok Sakura Desa lalong, Wawancara 14 Januari 2019

Direktor Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Dewi, Shinta Novia, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa SIMPAN Pinjam (UEP-SP) Saduti Sejahtera di Desa Lambagsari, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu,* Pekan Baru, JOM FISIP, VOL 5 Edisi 2 Juli-Desember 2018.

Iskandar, M.Hatta, *Analisis Penanggulan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palembang,* Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palemangang, 2017.

Intan, Ketua Kelompok Mawar Desa Kalibamamase, Wawancara 12 Mei 2019

Kumiawati, Dwi Pratiwi.*Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi.* , Vol 1 No. 1.

Kurmiyati, Yulia.2015.*Pengembangan Kesyadayaan Kelompok PEW Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayaan Di Kota Yogyakarta.* Yogyakarta. Vol 5 No. 1.

Kementerian Agama RI

Masururoh, Anis.2016. *Pengaruh Pelaksana Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan(SPP) Terhadap Tingkat Kreativitas Ibu Rumah Tangga Dalam Mengembangkan Usaha Menengah Di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara.* Skripsi. Universitas Lampung: Bandar Lampung

Murdiansyah, Isnan.2014.*Evaluasi Program Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.*

Nanang, Fattah.2015.*Manejemen Strategik Berbasis Nilai.* Bandung: PT.Remaja Posyada,

Nihayah, Ana Zahrotun.2015.*Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Dan PovertyReduction Dalam Presfektif Ekonomi Islam.*Vol 5 No 2.

Nurganini, ST, sekretaris UPK Wawancara 14 Januari 2019

Jayadi, Sukman.2017.*Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal.* Skripsi Universitas Alama Ata.

Ritonga, Syafruddin.*Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Bagi Peningktan Perekonomian Masyarakat.* Politik UMA, Vol. 1 No. 2.

Sinaga , *Marlin, Peran Unit Pengelola Kegiatan UPK PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejhteraan Masyarakat Di Kecamatan Panggurungan Kabupaten Samosir*, Universitas Meda Area Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2018.

Soebianto, Poeroko, dan Titok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Presfektf Kebujakan Publik* (Alfabeta : Bandung, 2017)

Yanti, Irma, *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Masyarakat Islam Di Desa Tonapa Sumetera Utara*, Universitas Islam Negri Sumetra Utara, Fakultas Komunikasi dan Dakwah, 2017.

Yusni, Kelompok SPP Wawancara 20 Juni 2019

Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan kelompok Peminjam SPP.

Sekaligus kegiatan pencairan di Kantor UPK Kecamatan Walenrang

Kegiatan yang dilakukan Bendahara dan Sekretaris UPK Kecamatan.

Pencairan dana SPP pada kelompok peminjam kelompok Sakura Desa Lalong.